

Terkait Permen KP No 17 Tahun 2021, Nelayan Cibangban: Apakah Pemerintah Akan Menggaji Kami Tiap Bulannya?

Aa Ruslan Sutisna - SUKABUMI.OPINIPUBLIK.ID

Oct 27, 2021 - 20:41



Sukabumi - Penolakan terkait larang ekspor benur atau BL/Baby Lobster terus dilakukan sejumlah nelayan di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat salah satunya dilakukan oleh Warga Nelaya dari Cibangban Cisolok, Rabu 27 Oktober 2021.

Berlokasi di sekitar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Cibangban sejumlah warga nelayan yang hendak melaut membuat video penolakan Permen KP no 17 Tahun 2021 dengan di barengi memegang sanpanduk bertuliskan aspirasi mereka tersebut.

Pria yang akrab disapa Akung selaku perwakilan nelayan tersebut mengatakan dirinya berharap kepada Presiden Jokowi untuk memperhatikan nasib para nelayan terutama nelayan yang banyak potensinya.

Dalam video yang dibuatnya, dirinya menyampaikan poin-poin sebagai berikut.

1. Kebijakan Kementerian dan Perikanan tentang larangan benih lobster atau benur minta dicabut, karena buat kami/nelayan tidak adil dan tidak bijaksana.
2. Baby Lobster atau benur merupakan anugrah dari Allah tidak akan ada habisnya.
3. Kenapa benur dilarang ekspor? Sedangkan hasil bumi lainnya bisa ekspor seperti emas, minyak bumi dan lain-lain sedangkan itu ada habisnya dan merusak lingkungan.
4. Kami Bangsa Indonesia menyatakan tidak setuju dengan adanya pelarangan ekspor benih lobster/benur.
5. Bapak Jokowi yang terhormat, sebagai Presiden RI, Kami mohon untuk dicabut permen tentang pelarangan penangkapan benih lobster atau benur yang dibuat oleh Bapak Kementerian KKP RI.

Sesuai acara pembacaan tuntutan, dirinya menjelaskan bahwa tolong beri ruang kami sebagai warga nelayan yang ada potensi benurnya agar hidup sejahtera.

"Kalau benur ini dilarang terus, bagaimana nasib kami, apakah pemerintah akan menggaji kami tiap bulannya? dan membebaskan semua kebutuhan hidup kami sehari-hari?, kami masyarakat yang hanya butuh bisa makan tiap hari dan profesi kami sebagai nelayan," ungkapnya.

Lanjut dia, tolong perhatikan nasib kami Pak Presiden Jokowi, jika di Panggil Jokowi saya siap menghadap dan menceritakan keluh kesah kami sebagai nelayan disini terkait benur.

"Saya yakin Jokowi bisa menerima dan mempertimbangkan aspirasi rakyat kecil ini," harapnya.

Sebelumnya, aspirasi ini juga sudah disampaikan kepada anggota dewan DPR RI Komisi IV.

Para nelayan sangat berharap bahwa pemerintah benar-benar mempertimbangkan aspirasinya.

Masih menurutnya, apapun alasan kebijakan Permen KKP No 17 Tahun 2021 ini tetap membuat sengsara kehidupan kami.

"Apun alasan kebijakan Permen KKP No 17 Tahun 2021 ini tetap membuat sengsara kehidupan kami. Sekali lagi, tolong jadi bahan pertimbangan warga nelayan kami," ucapnya.

Mengutip dari Kompas.com yang berjudul ekspor-benih-lobster-kembali-dilarang-ini-penjelasan-nya.

"Saya menegaskan, BBL sebagai salah satu kekayaan laut Indonesia harus untuk pembudidayaan di wilayah NKRI. Untuk pembudidayaan wajib dilakukan di

wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan BBL," ungkap
Trenggono.